

Strategi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan BUMDesMa Berbasis Ketahanan Desa melalui Pendekatan Pemulihan Pascabencana

Imam Suryono^{1*}, Alya Kamelia Puspita²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

*imam.suryono@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) memiliki peran sentral dalam memulihkan stabilitas ekonomi di wilayah terdampak bencana melalui konsolidasi potensi antar-desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam memperkuat kapasitas BUMDesMa sebagai pilar ketahanan desa melalui pendekatan pemulihan ekonomi pasca bencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif selama program magang MBKM selama empat bulan di Unit Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kementerian memfokuskan strategi pada sinkronisasi kebijakan lintas sektoral dan penguatan kelembagaan yang adaptif terhadap risiko bencana, sebagaimana tertuang dalam *Policy Brief* Strategi Penanggulangan Pasca Bencana Sumatera dari Desa. Strategi ini berhasil mendorong BUMDesMa tidak hanya sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi dampak ekonomi bagi masyarakat perdesaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi Kebijakan; BUMDesMa; Pemberdayaan Masyarakat; MBKM; Pendampingan; Ketahanan Desa.

ABSTRACT

The Joint Village-Owned Enterprise (BUMDesMa) plays a central role in restoring economic stability in disaster-affected areas through the consolidation of inter-village potential. This study aims to analyze the strategies of the Coordinating Ministry for Community Empowerment in strengthening the capacity of BUMDesMa as a pillar of village resilience through a post-disaster economic recovery approach. The method used is descriptive qualitative with data collection through participatory observation during a four-month MBKM internship program at the Deputy Assistant Unit for Village and Rural Resilience. The results show that the ministry focuses its strategy on synchronizing cross-sectoral policies and strengthening institutions that are adaptive to disaster risks, as outlined in the Policy Brief on Post-Disaster Management Strategies for Sumatra from the Village. This strategy has succeeded in promoting BUMDesMa not only as a business unit but also as an instrument for mitigating the economic impact on rural communities in a sustainable manner.

Keywords: Policy Strategy; BUMDesMa; Community Empowerment; MBKM; Assistance; Village Resilience

PENDAHULUAN

Pembangunan perdesaan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Wilayah perdesaan masih menghadapi berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya akses terhadap sumber permodalan dan pasar. Kondisi tersebut menjadikan pembangunan perdesaan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat desa (Azhari et al., 2023).

Salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk mengelola potensi lokal secara kolektif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui optimalisasi sumber daya lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan asli desa (Karyana, 2023). Namun dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya kapasitas manajerial, keterbatasan modal usaha, serta belum optimalnya tata kelola kelembagaan (Rosari et al., 2022).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika desa dihadapkan pada kondisi pascabencana. Bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa, baik berupa kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas produksi, maupun menurunnya daya beli masyarakat (Harudin, 2025). Dalam konteks ini, keberadaan BUMDesMa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) menjadi semakin penting sebagai wadah kolaboratif antar desa untuk mempercepat pemulihan ekonomi berbasis kawasan. Pendekatan berbasis kawasan dinilai lebih efektif dalam mengoptimalkan potensi lintas desa serta memperkuat ketahanan ekonomi secara kolektif (Humanika et al., 2023).

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pemberdayaan desa, penguatan ekonomi lokal, serta pemulihan wilayah pascabencana (Kemenko, n.d.). Dalam peran koordinatif ini sangat penting agar program-program penguatan BUMDesMa tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam kerangka pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 (Maq et al., 2024).

Menurut Bencana. (2020) konteks kebijakan nasional, penguatan BUMDesMa berbasis ketahanan desa merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi desa sekaligus mempercepat pemulihan sosial-ekonomi pasca bencana. (Lisel, 2025) Ketahanan desa tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan bertahan dari guncangan, tetapi juga sebagai kapasitas untuk bangkit, beradaptasi, dan

berkembang melalui pengelolaan sumber daya yang lebih produktif dan berkelanjutan (Ibrahim et al., 2023).

Berdasarkan pengalaman magang MBKM di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, penguatan peran BUMDesMa masih memerlukan strategi kebijakan yang lebih terarah, khususnya di wilayah terdampak bencana. Lemahnya koordinasi program pemulihan ekonomi desa membuat peran BUMDesMa belum optimal, sehingga diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antar pemangku kepentingan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal desa secara kolektif mengenai strategi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam penguatan peran BUMDesMa pada pembangunan kawasan perdesaan. Menurut Humanika et al. (2023) sumber data utama berupa pengalaman empiris penulis selama magang MBKM di Kemenko PM serta analisis dokumen kebijakan penguatan BUMDesMa.

Lokasi, waktu Penelitian dan Teknik Pengumpulan data:

1. Observasi Partisipatif

Penelitian dilaksanakan di Unit Asisten Deputy Ketahanan Desa dan Perdesaan, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Durasi pengambilan data berlangsung selama empat bulan, terhitung sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026.

2. Studi Dokumentasi

Meliputi laporan kegiatan, notulensi rapat, dan dokumen resmi kementerian. Dan Membedah secara mendalam dokumen spesifik yaitu *Policy Brief* Strategi Penanggulangan Pasca Bencana Sumatera dari Desa.

3. Sosialisasi dan Diskusi Internal

Data didapat dari partisipasi penulis dalam rapat koordinasi lintas sektor serta kegiatan sosialisasi kebijakan ketahanan desa.

Teknik Analisis Data

Data diolah secara sistematis melalui tiga tahapan utama Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi peran Unit Asisten Deputy Ketahanan Desa dan Perdesaan dalam mendorong pemulihan ekonomi berbasis kebijakan dan peran kelembagaan dalam penguatan BUMDesMa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap dokumen *policy brief* serta pengalaman empiris penulis selama melaksanakan magang MBKM di unit Asisten Deputy Ketahanan Desa dan Daerah Tertinggal, ditemukan bahwa penguatan BUMDesMa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya pemulihan ekonomi desa pasca bencana. *Policy brief* menegaskan bahwa bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera pada tahun 2025 menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat desa, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Tercatat terdapat lebih dari 52

kabupaten/kota yang terdampak, dengan sekitar 1.216 desa mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat.

Peran Kemenko PM dalam Penguatan BUMDesMa

Berdasarkan hasil observasi selama magang, Kemenko PM menjalankan peran strategis sebagai koordinator lintas kementerian dalam:

Sinkronisasi Kebijakan Pemberdayaan Desa melalui BUMDesMa Berdasarkan Analisis Policy Brief

Hasil kajian kebijakan dalam *policy brief* menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan pascabencana yang paling efektif adalah pemulihan berbasis desa. Desa dinilai sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki kewenangan penggunaan Dana Desa, serta didukung oleh kelembagaan lokal seperti pemerintah desa, pendamping desa, dan BUMDes/BUMDesMa. Oleh karena itu, penguatan peran BUMDesMa menjadi sangat relevan sebagai instrumen pemulihan ekonomi masyarakat. BUMDesMa dapat difungsikan untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi produktif, menciptakan lapangan kerja, serta mengoordinasikan berbagai program bantuan yang masuk ke desa.

Policy brief merekomendasikan pembagian desa terdampak ke dalam tiga klaster utama, yaitu klaster desa dengan kerusakan berat, kerusakan sedang, serta desa yang terdampak secara sosial-ekonomi. Pembagian klaster ini bertujuan agar intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing desa. Dalam konteks ini, BUMDesMa sangat berperan terutama pada klaster desa dengan dampak sedang dan dampak sosial-ekonomi, di mana fokus pemulihan diarahkan pada penghidupan kembali aktivitas ekonomi lokal, pemberdayaan usaha masyarakat, serta optimalisasi potensi desa.

Salah satu temuan penting dari *policy brief* adalah perlunya relaksasi kebijakan penggunaan Dana Desa bagi desa terdampak bencana. Dokumen tersebut menekankan bahwa regulasi yang ada, khususnya PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang penyaluran Dana Desa berbasis kinerja, kurang memberikan fleksibilitas bagi desa yang sedang berada dalam kondisi darurat. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2025 juga berpotensi membatasi kemampuan desa untuk melakukan pemulihan ekonomi secara cepat dan adaptif. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan khusus yang memungkinkan Dana Desa digunakan secara lebih fleksibel untuk mendukung program pemulihan ekonomi melalui BUMDesMa.

Policy brief juga menekankan pentingnya integrasi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Skema pemulihan yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan Dana Desa, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor melalui APBN, APBD, dana CSR, serta dukungan lembaga non-pemerintah. Dalam kerangka ini, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan sinkronisasi program dan anggaran antar kementerian/lembaga agar mendukung penguatan ekonomi desa secara terpadu. Peran koordinatif ini sangat

relevan dengan tugas yang dijalankan oleh unit Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Daerah Tertinggal tempat penulis melaksanakan magang.

Selain itu, *policy brief* menekankan bahwa intervensi pemulihan harus didahului dengan pemetaan kapasitas desa secara menyeluruh. Tidak semua desa memiliki tingkat kesiapan yang sama, sehingga strategi penguatan BUMDesMa perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Desa dengan kapasitas kelembagaan yang kuat dapat langsung diarahkan pada pengembangan usaha produktif, sementara desa dengan kapasitas terbatas memerlukan pendampingan intensif terlebih dahulu. Pendekatan berbasis kebutuhan ini menjadi landasan penting dalam merancang program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang implementasi kebijakan, hasil pengamatan penulis selama magang menunjukkan bahwa Kemenko PM melalui Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Daerah Tertinggal telah berupaya menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain koordinasi lintas kementerian, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta monitoring program pemberdayaan desa. Namun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi adalah sinkronisasi regulasi dan keterbatasan fleksibilitas anggaran. Tanpa dukungan kebijakan yang adaptif, peran BUMDesMa sebagai motor pemulihan ekonomi desa belum dapat berjalan optimal.

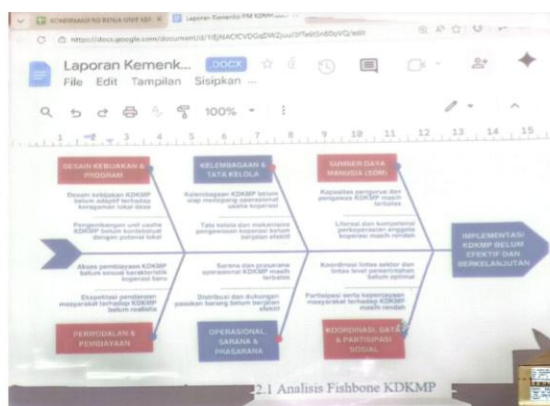
Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan BUMDesMa dalam konteks pemulihan pascabencana sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu fleksibilitas kebijakan Dana Desa, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta kapasitas kelembagaan desa. Policy brief memberikan landasan rekomendasi yang kuat bahwa pemulihan berbasis desa merupakan pendekatan paling strategis, dan BUMDesMa harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam proses tersebut. Temuan ini sejalan dengan pengalaman empiris penulis selama magang, yang menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat memerlukan kolaborasi kebijakan, pendampingan berkelanjutan, serta dukungan regulasi yang berpihak pada kebutuhan desa terdampak bencana pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Diskusi Laporan Kemenko PM Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) 2026
Sumber: Dokumentasi penulis, 2026

Analisis Fishbone Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP)

Hasil analisis kebijakan yang disajikan dalam bentuk diagram fishbone atau diagram tulang ikan dengan judul “Analisis Fishbone KDKMP”. Diagram tersebut menggambarkan berbagai faktor penyebab mengapa implementasi program KDKMP belum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. KDKMP dalam konteks ini merupakan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sedang dianalisis oleh unit Asisten Deputy Ketahanan Desa dan Daerah Tertinggal. Analisis fishbone digunakan sebagai alat untuk memetakan permasalahan secara sistematis sehingga dapat diketahui akar penyebab dari belum optimalnya pelaksanaan program di lapangan **Gambar 2.**



Gambar 2. Diskusi Analisis Fishbone Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) 2026

Sumber: Dokumentasi penulis, 2026

Berdasarkan diagram tersebut, permasalahan utama dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pada kategori pertama, yaitu desain kebijakan dan program, ditemukan bahwa kebijakan KDKMP yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap keberagaman kondisi lokal desa. Pengembangan unit usaha yang dirancang masih kurang kontekstual dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Selain itu, akses pembiayaan yang tersedia belum sesuai dengan karakteristik koperasi atau unit usaha baru yang sedang berkembang. Ekspektasi masyarakat terhadap pendanaan program juga dinilai belum realistis, sehingga sering kali terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan desain program yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan, program yang dirancang masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat desa.

Pada kategori kedua, yaitu kelembagaan dan tata kelola, ditemukan bahwa struktur kelembagaan KDKMP belum siap menopang operasional usaha koperasi atau unit usaha desa. Mekanisme tata kelola dan pengawasan yang ada juga belum berjalan secara efektif. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan program kurang terorganisir dengan baik dan sulit berkembang secara berkelanjutan. Lemahnya tata kelola kelembagaan menjadi salah satu faktor penting yang menghambat keberhasilan implementasi program pemberdayaan masyarakat.

Kategori ketiga berkaitan dengan aspek sumber daya manusia (SDM). Permasalahan utama pada aspek ini adalah masih terbatasnya kapasitas pengurus dan pengawas

program, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan manajerial. Literasi dan kompetensi masyarakat dalam bidang perkoperasian dan pengelolaan usaha juga masih relatif rendah. Keterbatasan SDM tersebut menjadi kendala besar dalam pengelolaan BUMDesMa maupun program pemberdayaan lainnya, karena keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan pelaksana di tingkat desa.

Selanjutnya, pada kategori permodalan dan pembiayaan, analisis menunjukkan bahwa akses terhadap sumber pembiayaan masih sangat terbatas. Skema pembiayaan yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil usaha desa, terutama bagi koperasi atau unit usaha yang baru berkembang. Minimnya dukungan modal menyebabkan banyak program usaha desa tidak dapat berjalan optimal dan sulit berkembang dalam jangka panjang. Tanpa dukungan permodalan yang memadai, tujuan penguatan ekonomi masyarakat melalui program KDKMP menjadi sulit tercapai.

Pada kategori operasional, sarana, dan prasarana, ditemukan bahwa fasilitas pendukung kegiatan operasional masih sangat terbatas. Ketersediaan sarana kerja, infrastruktur, serta dukungan distribusi dan pasokan barang belum berjalan secara efektif. Keterbatasan ini menghambat keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh BUMDes maupun koperasi desa. Program pemberdayaan ekonomi tidak dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Kategori terakhir dalam analisis fishbone adalah koordinasi, data, dan partisipasi sosial. Dalam aspek ini ditemukan bahwa koordinasi lintas sektor maupun lintas level pemerintahan masih belum optimal. Selain itu, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap program juga masih relatif rendah. Kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat menyebabkan implementasi program pemberdayaan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Rendahnya keterlibatan masyarakat juga berdampak pada minimnya keberlanjutan program di tingkat desa.

Secara keseluruhan, analisis fishbone tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai faktor penghambat implementasi program KDKMP. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan program pemberdayaan masyarakat, termasuk BUMDesMa, memerlukan perbaikan dari berbagai aspek secara terintegrasi, mulai dari desain kebijakan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dukungan permodalan, penyediaan sarana prasarana, hingga perbaikan koordinasi dan partisipasi masyarakat. Hasil analisis ini menjadi dasar penting bagi unit Asisten Deputy Ketahanan Desa dan Perdesaan dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Integrasi Pembangunan Berbasis Kawasan (*Area-Based Development*)

dijalankan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan bahwa pengembangan BUMDesMa tidak lagi dilakukan secara parsial atau terisolasi di satu desa saja, melainkan menyatu dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas. Melalui fungsi koordinasi lintas kementerian, perencanaan dan penganggaran diselaraskan agar BUMDesMa dapat berfungsi sebagai motor penggerak dalam klusterisasi ekonomi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP). Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan

potensi unggulan kawasan secara kolektif, sehingga memperkuat daya saing ekonomi lokal dan menciptakan ketahanan desa yang lebih sistematis dalam menghadapi tantangan pembangunan maupun pemulihan pasca bencana.

Relaksasi Regulasi Fiskal dan Sistem Pengawasan Data Terpadu:

dijalankan melalui koordinasi intensif untuk menyusun regulasi turunan, seperti Permendes dan Surat Edaran teknis dari Kementerian Keuangan, guna memberikan fleksibilitas penggunaan Dana Desa bagi wilayah terdampak bencana agar proses pemulihan tidak terhambat oleh kendala administratif. Langkah ini dibarengi dengan penguatan manajemen data melalui pengembangan *Integrated Recovery Dashboard* sebagai platform satu data desa pasca bencana yang menghubungkan informasi dari Kemendes, BNPB, dan Kemenkeu. Dengan mengintegrasikan sistem pelaporan yang ringan dan transparan, kementerian memastikan progres pemulihan, penyerapan anggaran, serta tingkat kerusakan dapat dipantau secara *real-time* tanpa menambah beban administratif bagi aparatur desa yang sedang berada dalam masa transisi pemulihan.

Peningkatan kapasitas lembaga dan pelestarian prinsip lokal melalui kebijakan:

dilakukan melalui koordinasi pelatihan dan pendampingan berjenjang bagi pengurus BUMDesMa guna meningkatkan keterampilan manajerial serta kemampuan mitigasi risiko ekonomi, khususnya di daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Upaya ini disinergikan dengan perlindungan terhadap nilai-nilai lokal dan budaya adat, seperti tradisi "smong" di Aceh atau "hutan larangan" di berbagai wilayah Sumatera, agar kearifan tersebut tetap terintegrasi dalam strategi mitigasi bencana nasional. Dengan melindungi kepemilikan tanah adat dan melestarikan budaya lokal melalui regulasi yang berpihak, kementerian memastikan bahwa pembangunan kekuatan ekonomi desa tidak hanya bersifat modern secara administratif, tetapi juga memiliki akar sosiokultural yang kuat dalam menjaga resiliensi masyarakat terhadap bencana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memiliki strategi yang cukup komprehensif dalam mengoptimalkan peran BUMDesMa melalui berbagai pendekatan, antara lain koordinasi kebijakan lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan desa, pendampingan teknis, serta pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan program. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mendorong BUMDesMa agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, unit Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan memiliki peran penting sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam proses perumusan kebijakan, koordinasi program, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan BUMDesMa di berbagai daerah.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dijalani oleh penulis selama empat bulan di lingkungan Kemenko PM juga memberikan pengalaman yang sangat berharga, karena memungkinkan mahasiswa untuk memahami secara langsung proses implementasi kebijakan publik di bidang pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan magang tersebut, penulis memperoleh gambaran nyata mengenai dinamika perumusan kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDesMa di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun berbagai upaya strategis telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BUMDesMa masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan yang lebih adaptif serta pendampingan berkelanjutan agar BUMDesMa dapat berkembang secara optimal.

Selain itu, hasil analisis policy brief yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi pascabencana perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis desa, salah satunya melalui optimalisasi peran BUMDesMa sebagai lembaga ekonomi lokal. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan relaksasi regulasi terkait pemanfaatan Dana Desa serta integrasi berbagai sumber pendanaan yang dapat mendukung keberlanjutan operasional BUMDesMa. Penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan kompetensi pengelola, serta pendampingan teknis yang berkesinambungan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan ekonomi desa. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Kemenko PM memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan kebijakan penguatan BUMDesMa sebagai instrumen strategis ketahanan desa, dan pengalaman magang di Unit Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Daerah Tertinggal memberikan pemahaman empiris yang mendalam mengenai pentingnya sinergi kebijakan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A., Mustofa, M., Meisari, E. D., & Anggarista, E. T. S. (2023). Pengembangan badan usaha milik desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia: Kualitas sumber daya manusia; BUMDes; strategi pengembangan usaha. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(2), 82–92.
- Bencana, B. N. P. (2020). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. *BNPB, Jakarta*, 1, 115.
- Harudin, L. (2025). Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Perspektif Inovasi, Kolaborasi, dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi*, 1(4), 33–45.
- Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 8(2), 101–116.
- Ibrahim, A., Canon, S., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh alokasi dana desa dan pengembangan BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Journal of Economic and Business Education*, 1(2), 193–201.
- Karyana, Y. (2023). *Inovasi Pemberdayaan BUMDes Sebagai Simpul Penggerak*

- Ekonomi Masyarakat Desa. Populika, 11 (1), 41–49.*
- Kemenko, P. M. (n.d.). *Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.*
- Lisel, N. S. (2025). *IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DANA DESA (STUDI KAMPUNG BUMI DIPASENAABADI KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG.*
- Maq, M. M., Dewi, S. P., Muktar, M., Suningrat, N., & Sitopu, J. W. (2024). Pendampingan balai desa dalam mengembangkan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(5), 185–191.
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan BUMDes di era digitalisasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3040–3049.